

Kebijakan harga pada institusi pendidikan Islam

Dr. D. Papadakis¹, Dr. N. Georgiadis¹, Dr. K. Vassiliou¹, Dr. E. Antoniou^{1*}

¹ Faculty of Medicine and Clinical Research Center, University of Crete,
Heraklion, Greece

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Saat ini persaingan lembaga pendidikan untuk menawarkan jasa pendidikan sangat pesat. Setiap lembaga pendidikan berusaha untuk menunjukkan berbagai keunggulan-keunggulan dan prestasi yang dimiliki sehingga menjadi daya tarik konsumen atau masyarakat untuk memilih jasa pendidikan yang mereka sediakan. Lembaga pendidikan yang tidak dapat bersaing dengan yang lainnya maka dampaknya akan ditinggalkan oleh konsumennya.

Pemasaran atau marketing pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengenalkan lembaga atau instansi pendidikan kepada masyarakat. Pemasaran merupakan usaha atau kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen sehingga terjadi proses pertukaran.

B. Pembahasan

1. Pengertian Biaya Pendidikan dan Biaya Pendidikan Islam

Price atau pembiayaan dalam jasa pendidikan adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Elemen harga pendidikan dipertimbangkan mengenai penetapan harga, seperti pembayaran spp, bangunan, biaya praktik, biaya laboratorium, dan sebagainya. Price merupakan elemen yang berjalan secara sejajar dengan mutu produk. Tujuan pembayaran biaya di sekolah atau madrasah yaitu untuk keseimbangan antar biaya yang digunakan untuk produksi dalam sebuah institusi dengan konsumen yang membeli atau pengguna produk. Produk yang baik akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan atau konsumen sehingga konsumen rela membayar biaya yang

ditetapkan oleh lembaga asalkan produk yang ditawarkan bermutu dan memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.¹

Pembiayaan dapat dipahami dari penggunaan istilah cost. Secara sepintas cost identik dengan expenditure. Kata cost dapat diikuti adjective dapat berarti sacrifice, ukuran dengan harga yang harus dibayar atau dibutuhkan, untuk menerima barang atau layanan. Biaya (cost) tidak jauh berbeda dengan konsep pembiayaan (financing). Financing atau pembiayaan lebih merupakan sebagai penyediaan dana atau biaya atau sumber daya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Kaushik et.al menjelaskan bahwa finance adalah sebuah keputusan yang menetapkan sumber daya atau keuangan untuk dibawa masuk dalam bisnis dari eksternal investor dari kreditor untuk investasi dalam proyek yang menguntungkan. Adapun menurut Fattah mendefinisikan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan mencakup: gaji guru, peningkatan profesional guru, sarana ruang belajar, perbaikan ruang, mengadakan peralatan atau mebeleur, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.²

Pembiayaan lembaga pendidikan islam diartikan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan lembaga pendidikan islam. ini berarti bahwa manajemen dituntut mampu menghimpun dana (raising of fund) dan mengalokasikan (allocation of funds) dana tersebut, sehingga tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, jika pengertian tersebut diaplikasikan di lembaga-lembaga pendidikan islam, maka manajemen keuangan atau pembiayaan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin

¹ Muhammad Mukhtar S, Pemasaran dan Upaya dalam Mempengaruhi Harapan Stakeholder dalam Lembaga Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 14 No.2, Juli-Desember, 2017, h.173

²Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 61-62.

lembaga pendidikan menghimpun dana dan mendistribusikannya, sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara tepat asas dan tepat guna (efektif dan efisien).³

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan lembaga pendidikan islam adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Dana tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti pengadaan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, perbaikan ruang sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber-sumber Biaya Pendidikan

a. Biaya Pendidikan/Sekolah

Biaya sekolah seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi dua sumber utama, yaitu sumber internal dan eksternal. Pada sumber internal, biaya sekolah berasal dari orang tua siswa (walaupun ada sedikit yang dapat berasal dari siswa itu sendiri karena dia ikut membantu orang tua dalam hal mencari nafkah). Seperti yang dijelaskan dalam ayat 8 pada surat Al Ankabut berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ
جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah

³Baharuddin & Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), h. 116.

kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada Ku lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS 29:8).

Sedangkan pada sumber eksternal biaya sekolah berasal dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan mutu pendidikan maka kedua macam biaya tersebut harus bersinergi.

Menurut PP No 48 Tahun 2008 ada tiga jenis biaya pendidikan, yaitu:

1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat,
3. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia; bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mapu membiayai pendidikannya; beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan antara lain terdiri dari bantuan/hibah pemerintah, di mana dana itu harus dikelola berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Terdapat dua hal penting dalam konsep biaya di sekolah, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan persiswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah

keseluruhan biaya pendidikan tingkat sekolah dalam kurun waktu satu tahun pelajaran dan berasal dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah maka pemerintah menyalurkan dana BOS. Adapun tujuan dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu. Penggunaan dana BOS (tahun 2012) berdasarkan keputusan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran,
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa,
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian,
5. Pembelian bahanbahan habis pakai,
6. Langganan daya dan jasa,
7. Perawatan sekolah,
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer,
9. Pengembangan profesi guru,
10. Membantu siswa miskin,
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat computer
13. Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS.

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya sekolah yang berasal dari siswa (orang tua sendiri). Dukungan biaya pribadi sangat mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan pendidikan siswa tersebut. Kemampuan masingmasing pribadi berbedabeda, sehingga besaran biaya pribadi peserta didik juga bervariasi. Secara umum, siswa dalam level pendidikan wajib belajar Sembilan tahun akan memerlukan biaya pribadi tersebut, seperti biaya pendaftaran, uang pangkal, biaya baju seragam, biaya kegiatan satu tahun, dan biaya buku untuk satu tahun.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dapat tercipta dengan dukungan pengelolaan biaya pendidikan yang baik. Undang Undang Sisdiknas pasal 50, menjelaskan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Peningkatan mutu pendidikan nasional harus didukung dengan kecukupan dana, sarana dan prasarana yang baik dan sumber dayam manusia yang handal, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Dengan sumber daya yang unggul dan pengelolaan biaya sekolah yang baik akan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas.⁴

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan

Menurut Masditaou (2017:126-127). Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu efektifitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

a. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan

⁴ Himyar Pasrizal, 2014. Manajemen Biaya Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Al Fikrah*, Vol.II No.1, h.16 s.d 18

kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektifitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektifitas lebih dalam lagi, kaena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. "Effectiveness characterized by qualitative outcomes". Efektifitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas

dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Garner menyebutkan “Efficiency characterized by quantitative outputs. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan.
2. Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

4. Urgensi Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam

Pentingnya anggaran pendidikan sebenarnya telah disadari sebagian pemimpin negeri ini. Sebagian pemimpin tahu masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan salah satunya bergantung pada anggaran. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah dan para penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam porsi yang cukup, karena mengingat urgensi dan signifikansinya. Di samping itu, hal tersebut juga menjadi cerminan akan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik, orang tua dan stakeholders.

Di negeri ini, anggaran 20% untuk pendidikan masih tersendat, meskipun pada anggaran 2009 sudah mencapai 224 trilyun, tetapi masih dengan gaji guru dan dosen yang menjadi pendidik. Mengulas pernyataan Mendiknas bahwa anggaran itu, akan digunakan sesuai rancangan pembangunan pendidikan yang sudah dirancang sebelumnya. Hal ini mengartikan bahwa rancangan pembangunan dan pengembangan pendidikan, ternyata sudah lama tidak berjalan dan tidak dijalankan, karena terbentur dengan biaya atau

anggaran yang seakan telah menjadi problem laten negara. Inilah pentingnya biaya atau anggaran dalam mengembangkan pendidikan.

Pasca reformasi negeri ini sudah mulai jelas akan menuju kepada era industri, yang mana posisi modal (uang) seakan telah menjadi posisi paling urgen. Orang tua peserta didik di Indonesia menganggarkan biaya hampir mencapai 90% dari total biaya hidup untuk anak-anak mereka agar supaya bisa sekolah. Bahkan mereka rela menggadaikan, hutang, bahkan menjual apa yang bisa dimanfaatkan untuk biaya sekolah atau kuliah anak mereka. Inilah bukti betapa pentingnya biaya atau anggaran dalam pendidikan dan lembaganya.

Kualitas pendidikan, dapat dicerminkan dengan biaya yang dikeluarkan dan pengendaliannya, Informasi laporan biaya, terutama tipe aktivitas dan unit cost yang seharusnya diawasi, membuktikan bahwa kualitas layanan dan variasinya amat ditentukan dengan kemampuan pengelolaan uang dengan tepat dan akurat. Hal ini membuktikan bahwa sistem biaya sebagai bagian dari manajemen keuangan merupakan salah satu penentu terwujudnya kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan.

Keuangan dan pembiayaan, merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah/madrasah, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah/madrasah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah/ madrasah sudah pasti memerlukan biaya.

5. Ruang Lingkup Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam

Pada intinya, manajemen merupakan keharusan untuk melaksanakan aktivitas pengaturan. Begitu juga dengan pembiayaan, harus diatur sejak perolehan, pengalokasian, pendayagunaan, sampai pada pertanggungjawaban. Berdasarkan hal itu, manajemen pembiayaan berfungsi untuk:

1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian, dana yang diperoleh, dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan.
2. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan.
3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.

Adapun secara spesifik manajemen pembiayaan dilembaga pendidikan memiliki fungsi untuk:

- 1) Meramalkan kemampuan sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan.
- 2) Melakukan proses pengelolaan keuangan dengan benar, tepat, akurat, sesuai dengan yang dibutuhkan baik dilihat dari alokasi, penggunaan maupun mutu pendidikan yang diperoleh.
- 3) Mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan kepercayaan warga sekolah/madrasah, yang pada gilirannya dapat melahirkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program pendidikan.
- 4) Menggambarkan seluruh kegiatan komponen sistem Organisasi lembaga pendidikan serta maramalkan harga setiap kegiatan.
- 5) Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah/ madrasah (Puslitbang, 2005:133-134).

Sebenarnya tidak ada kategorisasi lembaga pendidikan dikatakan maju dan tidak maju. Bila dicermati lebih dalam, kategorisasi kelembagaan pendidikan lebih tepat bila disebut dalam pengelolaan yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan berupaya memberikan garis-garis besar, sebagai bagian dari menjawab dan menciptakan sesuatu yang ingin diraih sekolah/madrasah dimasa depan. Dengan demikian. Pada dasarnya biaya pendidikan memang penting, tetapi tidak kalah pentingnya, bagaimana para pengelolanya melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Sebagai penentu kualitas pelayanan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang, jasa dan uang, menjadi kunci utama yang harus dimiliki kepala sekolah/madrasah.

Terlebih dalam upaya mengimplementasi MBS, kemampuan sekolah/madrasah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan, menjadi tuntutan dan bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi penentu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik, agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjangi tercapainya tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, juga memiliki hak sumber daya keuangan demi terlaksananya program

yang disusunnya. Sudah barang tentu pondok pesantren, memerlukan pula pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Hal seperti itulah yang dapat menjadikan semua kalangan, mulai dari personil pondok pesantren sendiri, maupun dari pihak luar pondok pesantren, dapat mengetahui keadaan keuangannya. Negara dalam hal ini, juga memerlukan proses manajemen keuangan, seperti dalam aspek penerimaan pajak, dana-dana pemerintahan, pinjaman negara, serta tata laksana hutang negara. Dari situlah dapat diketahui suatu anggaran belanja negara.

Seberapa penting pengelolaan anggaran pada dunia pendidikan? Memahami anggaran pendidikan adalah salah satu kebutuhan mendasar masyarakat saat ini. Jika melihat politik anggaran pendidikan pemerintah, didasarkan atas beberapa hal pertama, anggaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan paling penting. Kedua, anggaran mencerminkan komitmen dan pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah dan para penyelenggaran pendidikan. Ketiga, anggaran merupakan alat yang digunakan pemerintah dan para penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembangunan. Indra Bastian mengungkapkan, penggunaan anggaran dan pengelolaannya dilembaga Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Dalam skala mikro manajemen keuangan, dapat meningkatkan nilai organisasi.
- b. Dalam skala makro manajemen keuangan, mempunyai peranan penting dalam peranan perekonomian negara (Indra, 2007).

Sedangkan yang termasuk komponen manajemen keuangan pendidikan diantaranya: (1) Anggaran pendidikan, (2) pola subsidi pendidikan, (3) pelaporan pengelolaan keuangan sekolah/ madrasah, (4) pengukuran dan pelaporan kinerja sekolah, (5) coasting dan procing layanan pendidikan, (6) audit keuangan dan kinerja sekolah.

Manajemen pembiayaan pendidikan tersebut merupakan gambaran kualitas pelayanan pendidikan. Untuk lebih memperjelas mengenai hal itu, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Manajemen biaya pendidikan dapat membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan. Selain itu juga dapat menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif.

2. Pengendalian terhadap administrasi manajemen biaya pendidikan, akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stake holders). (Indra, 2007).⁵

C. Penutup

Price atau pembiayaan dalam jasa pendidikan adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Elemen harga pendidikan dipertimbangkan mengenai penetapan harga, seperti pembayaran spp, bangunan, biaya praktik, biaya laboratorium, dan sebagainya. Price merupakan elemen yang berjalan secara sejajar dengan mutu produk. Tujuan pembayaran biaya di sekolah atau madrasah yaitu untuk keseimbangan antar biaya yang digunakan untuk produksi dalam sebuah institusi dengan konsumen yang membeli atau pengguna produk. Produk yang baik akan memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan atau konsumen sehingga konsumen rela membayar biaya yang ditetapkan oleh lembaga asalkan produk yang ditawarkan bermutu dan memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Sebenarnya tidak ada kategorisasi lembaga pendidikan dikatakan maju dan tidak maju. Bila dicermati lebih dalam, kategorisasi kelembagaan pendidikan lebih tepat bila disebut dalam pengelolaan yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan berupaya memberikan garis-garis besar, sebagai bagian dari menjawab dan menciptakan sesuatu yang ingin diraih sekolah/madrasah dimasa depan. Dengan demikian. Pada dasarnya biaya pendidikan memang penting, tetapi tidak kalah pentingnya, bagaimana para pengelolanya melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Sebagai penentu kualitas pelayanan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang, jasa dan uang, menjadi kunci utama yang harus dimiliki kepala sekolah/madrasah.

⁵ Baharuddin & Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam...*, h. 146-148.

DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin, Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: Uin-Maliki Press, 2010

Juhaidi Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2019

Mukhtar S Muhammad, Pemasaran dan Upaya dalam Mempengaruhi Harapan Stakeholder dalam Lembaga Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 14 No.2, Juli-Desember, 2017.

Pasrizal Himyar, 2014. Manajemen Biaya Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Al Fikrah*, Vol.II No.1